

## Menciptakan Lapangan Kerja Melalui Investasi:

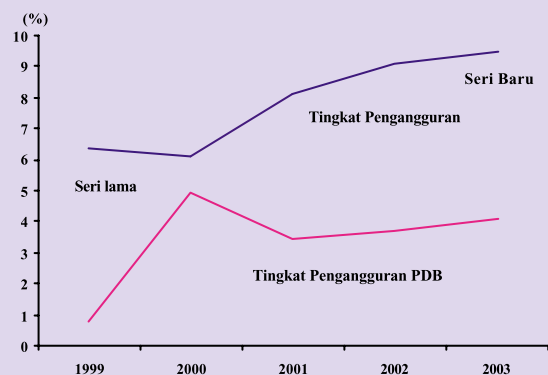
Saran-Saran dari Masyarakat Donor  
Untuk Memperbaiki Iklim Investasi Indonesia<sup>1</sup>  
Oktober 2004

### Permasalahan

Perbaikan iklim investasi menjadi salah satu tantangan terpenting yang dihadapi oleh Pemerintahan baru. Pemerintahan sebelumnya telah membuat kemajuan berarti dalam mencapai kestabilan makroekonomi dan politik. Upaya-upaya untuk mengatasi dampak krisis keuangan dan melaksanakan rencana tindakan White Paper memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap kebijakan perekonomian yang sehat. Akan tetapi, lemahnya investasi di dalam negeri maupun luar negeri telah menghambat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi sesuai yang diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan pekerjaan yang layak kepada masyarakatnya (Gambar 1). Dengan telah pulihnya sebagian besar permasalahan akibat krisis ekonomi, para donor mengimbau Pemerintahan baru agar memberikan perhatian pada perbaikan investasi di Indonesia khususnya investasi sektor swasta.

Masyarakat donor internasional dan masyarakat bisnis sangat menganjurkan Pemerintahan yang baru dapat segera mengumumkan rencana memperbaiki iklim investasi Indonesia. Rencana ini perlu mencakup dua unsur: (i) paket tindakan jangka pendek yang mengirimkan sinyal yang meyakinkan tentang komitmen Pemerintahan terhadap reformasi iklim investasi (lihat Kotak 1 di halaman 4), dan (ii) roadmap yang lebih komprehensif mengenai tindakan prioritas jangka menengah. Rencana tersebut akan

Gambar 1. Pertumbuhan yang tidak memadai untuk penciptaan lapangan kerja (tingkat pertumbuhan riil dan tingkat pengangguran)



Sumber. BPS, Staf Bank Dunia

meyakinkan kembali masyarakat bisnis mengenai komitmen pemerintah terhadap kebijakan ekonomi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kami siap mendukung Pemerintah apabila rencana tersebut dirancang dan dilaksanakan secara demikian.

Tingkat kapasitas produksi Indonesia sudah mencapai tingkatan yang tinggi, bukti bahwa para investor tetap tertarik untuk memasuki pasar dalam negeri Indonesia yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah yang terfokus untuk memperbaiki iklim investasi kemungkinan besar akan cepat mengarah ke peningkatan realisasi investasi. Pada saat yang sama, investasi juga menghasilkan peningkatan teknologi, penetrasi yang lebih besar ke pasar eksternal, serta pemantapan pelayanan yang penting dan sektor sumber daya alam. Menarik investasi yang berkualitas akan menjadi kunci untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas tinggi dan melindungi kestabilan ekonomi dan politik.

<sup>1</sup> Dokumen ini adalah rencana tindakan yang disarankan untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia oleh Kelompok Kerja Iklim Investasi CGI (Consultative Group on Indonesia). Ini adalah hasil kolaborasi dan diskusi intensif antara para partisipan CGI dan konsultasi erat dengan para anggota masyarakat bisnis dalam dan luar negeri di Indonesia. Mitra pembangunan Indonesia dalam CGI memandang dokumen ini sebagai fase pembukaan dalam apa yang mereka harapkan akan menjadi dialog yang aktif dan suportif dengan Pemerintah baru mengenai reformasi iklim investasi.

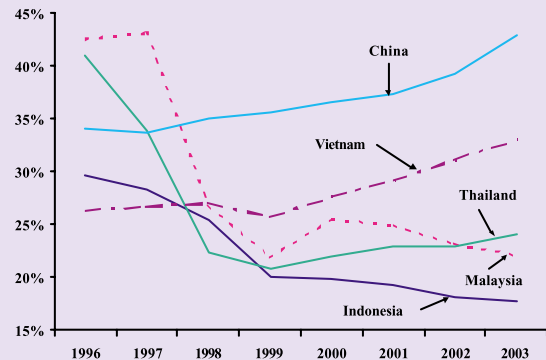
## Mengapa Investasi di Indonesia Ketinggalan

Selama tiga tahun terakhir ini, Pemerintah telah memperkuat kestabilan makroekonomi Indonesia dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi, menstabilkan Rupiah, mengurangi rasio utang luar negeri dan utang publik. Pemilihan umum dan pemilihan presiden yang berlangsung damai telah memperlihatkan bahwa demokrasi yang sah dan efektif sudah berjalan di Indonesia. Kalangan donor salut terhadap pencapaian bersejarah ini.

Namun, meskipun adanya pencapaian yang mengesankan ini, pertumbuhan ekonomi tetap berada di tingkat sedang dan masih digerakkan oleh konsumsi. Lapangan kerja sektor formal menurun dan pengangguran secara keseluruhan beranjak naik. Ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan pada tingkat sedang di Indonesia saat ini tidak memadai untuk menciptakan cukup kesempatan kerja bagi jutaan kaum muda yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Penyebab utamanya adalah investasi dalam dan luar negeri yang sangat lemah; pangsa investasi dalam PDB berada pada tingkat terendah sejak awal 1970an. Pada saat yang sama, para pesaing regional Indonesia terus membuat upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki iklim investasi mereka. Hal ini telah memungkinkan beberapa negara (misalnya Cina dan Vietnam) menarik sejumlah besar investasi besar dan, dalam banyak kasus, menarik investasi yang ada dan potensial dari Indonesia. Gambar 2 memperlihatkan bahwa Indonesia sangat ketinggalan dibanding para pesaingnya dari segi persentase PDB untuk total investasi.

Berbagai faktor mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Korupsi, kurangnya transparansi dan ketidakefisienan menciptakan rintangan berarti yang menimbulkan biaya peningkatan biaya moneter dan waktu bagi para investor di tingkat pusat dan daerah. Dalam beberapa kasus, biaya-biaya ini telah memaksa perusahaan untuk pindah ke negara lain atau memilih negara lain ketimbang Indonesia sewaktu membuat keputusan berinvestasi di kemudian hari. Sistem hukum telah gagal melindungi kemurnian kontrak, dan dunia telah menyaksikan penyalahgunaan sistem hukum yang telah membuat iklim investasi Indonesia merosot. Meskipun desentralisasi telah menciptakan kesempatan, tapi juga telah menimbulkan ketidakpastian peraturan dan biaya tambahan pada tingkat daerah. Infrastruktur Indonesia telah merosot sejak krisis, dan biaya waktu maupun moneter akibat kemacetan infrastruktur meningkat. Laporan Pembangunan Dunia 2005 (World Development Report 2005) oleh Bank Dunia menyoroti dampak serius permasalahan yang dihadapi para investor ini di Indonesia-lebih dari 40 persen perusahaan yang disurvei menganggap korupsi sebagai kendala utama di Indonesia, dengan biaya suap mencapai 4,6 persen dari penjualan. Hampir separuh dari perusahaan yang disurvei menyebutkan ketidakpastian kebijakan sebagai kendala utama.

Gambar 2. Investasi yang rendah di Indonesia berbanding dengan Internasional (Investasi sebagai pangsa PDB, persen)



Sumber: CEIC, Staff Bank Dunia

## Mewujudkan Investasi

Memperbaiki iklim investasi tidak menuntut Pemerintah untuk menuntaskan semua problem sekaligus. Hal itu menuntut Pemerintahan baru untuk (i) melindungi kemajuan yang telah dicapai sejauh ini; (ii) mengambil tindakan dini untuk mengirimkan sinyal yang jelas kepada birokrasi dan pasar, dan; (iii) merumuskan serta melaksanakan rencana jangka menengah yang komprehensif untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia. Rencana jangka menengah sangat penting karena hal itu akan menyediakan tolok-ukur untuk mengukur kinerja Pemerintah dan memberi para investor keyakinan bahwa kondisi akan terus menjadi lebih baik.

### 1. Mempertahankan Kemajuan yang Telah Dicapai

Kestabilan Makroekonomi. Kestabilan makroekonomi menjadi perhatian utama para investor karena hal tersebut memungkinkan mereka membuat rencana untuk masa depan. Banyak indikator memperlihatkan meningkatnya kestabilan makroekonomi di Indonesia. Namun, mengingat sulitnya memperkirakan kondisi perekonomian global, Pemerintahan baru harus melindungi pencapaian ini dengan cermat dan meneguhkannya melalui tindakan yang gigih untuk mendorong investasi dan memperbaiki iklim investasi.

Kestabilan dan Keamanan Politik. Kestabilan dan keamanan politik juga merupakan prasyarat penting untuk investasi. Pemilihan umum dan pemilihan presiden yang sukses telah mengirimkan sinyal positif kepada para investor. Indonesia harus membangun di atas catatan yang baik ini sambil mencamkan bahwa para investor tetap peka terhadap perkara ini dan akan terus membandingkan Indonesia dengan tetangganya. Pengeboman yang tragis baru-baru ini di Kedutaan Besar Australia menggarisbawahi pentingnya mengalahkan kelompok

teroris yang sedang beroperasi di Indonesia. Pemerintah memperoleh dukungan kuat dan terpadu dari para donor dalam upaya ini.

Pasar Terbuka. Keteguhan yang terus-menerus untuk mengikuti prinsip-prinsip pasar terbuka akan memastikan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat dari integrasi ekonomi dunia. Rezim perdagangan bebas dan pasar kompetitif memperkuat bisnis dalam negeri dan membuatnya lebih sanggup berkompetisi di dalam negeri dan dalam perekonomian global. Kebijakan proteksionis dan diskriminatif berdampak buruk terhadap perusahaan yang kurang diuntungkan dan juga terhadap keyakinan investor. Kami mengimbau Pemerintah untuk membalik kecenderungan “proteksionisme yang merayap” belakangan ini dalam bentuk berbagai persyaratan perizinan impor dan ekspor.

## 2. Tindakan Dini dan Tegas Sangat Penting

Pemerintahan baru memiliki kesempatan bersejarah untuk mengambil tindakan tegas guna memperbaiki iklim investasi. Organisasi berita dan pasar keuangan di seputar dunia akan mengamati bagaimana Presiden terpilih pertama di Indonesia melaksanakan mandatnya. Birokrasi akan mengamati untuk melihat apakah Indonesia telah memasuki era baru atau apakah akan tetap menjadi urusan biasa saja.

Kami sangat yakin bahwa Presiden baru harus meraih kesempatan ini dan mengumumkan suatu paket berisi langkah-langkah yang akan memperbaiki iklim investasi Indonesia sedini mungkin dalam masa pemerintahannya. Paket ini tidak perlu memuat solusi untuk semua problem. Tetapi, hendaknya diperlihatkan kepada para investor bahwa Pemerintahan memahami seriusnya situasi dan berkomitmen untuk memperbaiki iklim investasi, khususnya untuk investasi sektor swasta. Mengumumkan paket yang memuat langkah-langkah yang berani pada awal masa Pemerintahan ini dapat mengubah persepsi para investor terhadap Indonesia dan turut mempertegas dinamika positif di mana investasi mulai meluas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini selanjutnya akan memberikan kepada Pemerintah dukungan politik dan membangun dukungan dari seluruh masyarakat untuk reformasi lebih lanjut.

Selain langkah-langkah umum, kami mengimbau Pemerintah agar mempertimbangkan untuk mengumumkan dan melaksanakan sebuah paket langkah-langkah spesifik yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan utama bagi investor. Kotak di bawah ini mencantumkan sejumlah langkah umum dan spesifik yang kami yakini akan mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada para calon investor.

## 3. Menyusun dan Mengumumkan Roadmap Jangka Menengah yang Komprehensif

Banyak problem yang mengganggu iklim investasi bersifat kompleks dan membutuhkan konsultasi dengan masyarakat, undang-undang

baru atau yang diperbarui, dan reformasi kelembagaan yang dalam. Para investor memahami perlunya waktu untuk menuntaskan permasalahan ini. Akan tetapi, guna memiliki keyakinan untuk memperluas operasi mereka di Indonesia di tahun-tahun mendatang, mereka perlu mendapatkan komitmen yang terkoordinasi dari pemegang kekuasaan tingkat atas dalam mengatasi problem-problem utama saat ini. Mereka juga ingin melihat kemajuan yang stabil dalam bentuk keberhasilan kebijakan jangka pendek dan menengah dalam

### Kotak 1. Uraian Tindakan Segera untuk Memperbaiki Iklim Investasi

#### Langkah-Langkah Umum

- Pidato yang jelas dari Presiden baru yang menegaskan bahwa memperbaiki iklim investasi akan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintahan dan bahwa Pemerintah akan menyiapkan rencana jangka menengah untuk reformasi iklim investasi.
- Memperkuat secara signifikan mekanisme kelembagaan Pemerintah untuk menggerakkan reformasi iklim investasi melalui kebijakan dan peraturan birokrasi dan koordinasi yang mempengaruhi investor.
- Secara formal menetapkan dialog secara reguler antara Pemerintah dan masyarakat bisnis dalam negeri maupun internasional mengenai reformasi iklim investasi.

#### Langkah-Langkah Spesifik

- Mengumumkan penghapusan kemacetan yang menghambat satu atau lebih investasi yang menggantung.
- Membentuk kelompok tokoh terkemuka, atau badan independen lainnya, untuk memulai tinjauan komprehensif terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Kelompok ini bisa mulai mencari input dari masyarakat bisnis dan profesional mengenai masalah kebijakan pajak dan bidang-bidang utama mengenai ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.
- Melanjutkan perbaikan prosedur pengembalian pajak PPN yang telah mengurangi penundaan pembayaran kembali perusahaan-perusahaan di bawah Kantor Wajib Pajak Besar kepada semua perusahaan di bawah “Kantor Pajak Tata dengan Pemerintahan yang Baik untuk Sistem Administrasi Pajak Modern” yang baru.
- Membentuk suatu tim “help desk” yang terdiri atas para anggota Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang aturan perdagangan dan bea cukai.
- Dalam konsultasi dengan bisnis dan tenaga kerja, memulai tinjauan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak pekerja.
- Merevisi Keppres 7/1998 mengenai Kerja Sama Publik-Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, dan mulai membahas strategi jangka menengah untuk pembangunan infrastruktur.

memperbaiki iklim investasi Indonesia.

Cara terbaik untuk memberikan para investor kepastian kebijakan yang mereka cari adalah merumuskan, lewat konsultasi erat dengan masyarakat bisnis, sebuah roadmap jangka menengah yang komprehensif bagi reformasi iklim investasi. Roadmap ini akan mengembangkan pendekatan yang digunakan dalam White Paper. Roadmap ini perlu memuat langkah-langkah reformasi yang spesifik dengan batas waktu yang realistis tetapi tegas. Roadmap tersebut perlu menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi para investor, yang akan membutuhkan partisipasi aktif dari sejumlah kementerian. Tiga tujuan inti perlu mendasari roadmap jangka menengah tersebut: mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi pemerintah, meningkatkan kepastian hukum serta pelaksanaan kontrak, dan membuat proses desentralisasi di Indonesia sebagai mesin pendorong pertumbuhan investasi, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Prioritas kebijakan yang kami sarankan untuk roadmap tersebut diuraikan di bawah ini.

## Bidang-Bidang Kebijakan Prioritas Tinggi

Masyarakat bisnis dan para donor CGI telah mengidentifikasi lima bidang kebijakan prioritas tinggi, sebagai berikut: (1) perpajakan, (2) sistem bea dan cukai, (3) tenaga kerja, (4) infrastruktur dan (5) kebijakan investasi dan pembinaan UKM. Ini bukan daftar lengkap, tetapi penetapan prioritas penting. Pemilihan ini merupakan hasil dialog intensif antara para donor CGI dan para investor dalam negeri maupun luar negeri. Donor CGI menawarkan bantuan teknis dan dukungan lainnya dalam beberapa dari bidang-bidang ini, dan kami siap untuk berdiskusi dengan Pemerintah mengenai cara-cara untuk mempererat kemitraan kami. Kami telah menghapus diskusi tentang salah satu permasalahan penting bagi para investor-reformasi hukum-dalam bidang prioritas kami karena hal ini dibahas oleh Kelompok Kerja CGI yang lain.

### (1) Perpajakan

Pemerintah telah melaksanakan sejumlah reformasi utama atas sistem pajak Indonesia selaras

dengan The White Paper. Secara khusus, kami memuji dialog signifikan yang sedang dilakukan dengan masyarakat bisnis mengenai masalah perpajakan, serta perluasan Kantor Wajib Pajak Besar dan pembentukan enam kantor pajak “Tata Pemerintahan yang Baik” yang baru. Namun, kami amat yakin bahwa peningkatan lebih lanjut masih diperlukan. Beberapa rintangan utama bagi pengusaha adalah:

1. Beban arus kas yang disebabkan oleh penundaan yang berlebihan dalam audit dan pembayaran kembali PPN dan pajak penghasilan perusahaan, serta lamanya waktu dalam menjawab permohonan penilaian pajak.
2. Penilaian pro forma pada tingkat kewajiban pajak tahun sebelumnya mengakibatkan seringnya terjadi kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran dan audit yang dihasilkannya menambah problem arus kas dan menciptakan kesempatan bagi pejabat pajak untuk berbuat nakal. Maka, perlu kembali ke penilaian sendiri, dengan hukuman yang layak bagi pajak yang kurang.
3. Pelaksanaan peraturan pajak secara sewenang-wenang oleh pejabat pajak yang menyebabkan seringnya terjadi ongkos tambahan
4. Pajak mewah yang mendorong penyelundupan dan menciptakan persaingan yang tidak adil bagi produsen yang sah.
5. Jadwal depresiasi yang dapat memberikan disinsentif kepada investasi dalam pembaruan perlengkapan;

Kotak 2. Matriks Tindakan untuk Perpajakan

Tindakan Jangka Pendek (dalam tahun pertama)	Tindakan Jangka Menengah (2-5 Tahun)
a. Mengumumkan dan melaksanakan paket langkah-langkah reformasi pajak yang khususnya berkaitan dengan investor, seperti misalnya tingkat pajak potongan domestik atas pelayanan, tingkat depresiasi, dan sebagainya.	a. Mengumumkan dan melaksanakan rencana reformasi pajak yang komprehensif, termasuk tinjauan perundang-undangan pajak yang menggantung.
b. Membentuk badan peninjau independen dalam Kementerian Keuangan untuk melakukan kontrol kualitas yang efektif atas penilaian, meningkatkan transparansi dalam audit pajak, dan mencegah penilaian sewenang-wenang.	b. Merevisi peraturan/pedoman yang perlu untuk melaksanakan sistem penilaian sendiri sebagaimana dipraktekkan secara internasional.
c. Melakukan sosialisasi intensif mengenai Aturan Perilaku dan Undang-Undang Hak Wajib Pajak, termasuk dengan membagikannya kepada para pejabat pajak dan mengadakan sesi-sesi pelatihan.	c. Menegakkan sepenuhnya Aturan Perilaku dan Undang-Undang Hak Wajib Pajak melalui langkah-langkah administratif dan hukum.
d. Mengurangi jangka waktu untuk verifikasi dan pembayaran kembali PPN.	

Mengingat amat pentingnya sistem perpajakan yang adil dan efisien untuk pembangunan Indonesia, kami menyarankan agar Pemerintah menetapkan kelompok tokoh terkemuka, atau badan independen lainnya untuk meninjau sistem pajak Indonesia dan membuat rencana reformasi yang komprehensif. Kelompok tersebut dapat beranggotakan unsur-unsur dari dalam maupun luar Pemerintah, dan perlu berkonsultasi erat dengan sektor swasta. Kelompok tersebut perlu mempertimbangkan dampak perubahan kebijakan pajak terhadap anggaran Pemerintah. Yang tak kalah penting adalah menegakkan kerangka tata pemerintahan yang komprehensif termasuk mensosialisasikan secara intensif aturan perilaku bagi para pejabat pajak dan undang-undang hak wajib pajak, serta langkah pengamanan lainnya terhadap ketidakpastian. Kotak di bawah ini mencantumkan tindakan kebijakan prioritas yang disarankan.

## (2) Izin Bea dan Sistem Cukai

Indonesia telah secara proaktif melakukan pengurangan cukai dalam konteks AFTA dan memiliki tingkat cukai rata-rata yang rendah yakni 7,2 persen. Selaras dengan rekomendasi the White Paper, Indonesia telah meningkatkan sistem perizinan bea, dengan sukses mengefisienkan inspeksi bea, dan memperkenalkan sistem pembayaran on-line untuk bea cukai. Namun, reformasi ini belum secara memadai diwujudkan ke dalam peningkatan operasional

sebagaimana diukur dengan waktu yang diperlukan pengiriman untuk melewati pabean. Permasalahan utama bisnis yang terus-menerus muncul antara lain:

1. Peraturan pelaksanaan yang kompleks yang tidak sepenuhnya dipahami kalangan bisnis maupun pejabat bea cukai. Kompleksitas peraturan ini memberikan ruang administratif yang tak tidak pantas bagi pejabat bea cukai.
2. Pelaksanaan peraturan bea cukai yang samaunya oleh pejabat bea cukai yang telah menciptakan suatu kultur ongkos tambahan yang ilegal.
3. Kurangnya efisiensi dalam sistem perizinan bea di Indonesia dibandingkan dengan banyak pesaing regionalnya.

Kotak di bawah ini mencantumkan tindakan kebijakan prioritas yang disarankan.

## (3) Masalah Tenaga Kerja

Mogok kerja telah menurun dan ada banyak kemajuan dalam perundang-undangan hubungan tenaga kerja dan industri. Namun, masalah tenaga kerja tetap menjadi perhatian utama bagi kalangan bisnis, khususnya dalam industri yang sarat tenaga kerja. Penundaan dalam melaksanakan peraturan Undang-Undang Tenaga Kerja telah menciptakan ketidakpastian hukum dan operasional yang terus

mengikis keyakinan investor. Para investor beroperasi dalam lingkungan regional yang semakin kompetitif, dan kebijakan yang lebih patut diperlukan untuk semakin mengembangkan pekerjaan sektor formal yang lebih berkualitas.

Banyak aspek dari kebijakan mengenai tenaga kerja di Indonesia menghasilkan konsekuensi yang tidak diharapkan yang berupa pengurangan pertumbuhan dalam pekerjaan sektor formal, dan terus menjadi masalah bagi pelaku usaha. Bidang-bidang yang disarankan untuk diperbaiki secara spesifik mencakup:

1. Peraturan pemberhentian kerja
2. Tunjangan pesangon
3. Pekerja kontrak

**Kotak 3. Matriks Tindakan untuk Bea & Cukai**

Tindakan Jangka Pendek (dalam tahun pertama)	Tindakan Jangka Menengah (2-5 Tahun)
a. Meninjau "Aturan Perilaku", bagi Pejabat Bea Cukai, membagikannya kepada para pejabat bea cukai dan sektor swasta serta mengadakan sesi-sesi pelatihan.	a. Menegakkan sepenuhnya Aturan Perilaku melalui langkah-langkah administratif dan hukum.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan bea cukai dan waktu yang diperlukan pengiriman untuk melewati bea cukai (misalnya, mengatasi penundaan yang terjadi saat ini dalam pelayanan di akhir pekan).	b. Merevisi undang-undang dan peraturan administrasi bea cukai untuk mencegah ketidakpastian dalam pelaksanaan.
c. Mengkompilasi "Buku Aturan Bea Cukai", suatu kumpulan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang harus diperbarui setiap tahun.	c. Memperkuat mekanisme kontrol pasca pelepasan dan ketrampilan analisis risiko yang terkait di antara para pejabat Bea Cukai
d. Membentuk suatu badan independen untuk memantau pelaksanaan reformasi bea cukai yang dijanjikan dan melaporkannya kepada publik.	d. Mereformasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan menegakkan ketrampilan untuk menyelidiki penipuan guna mengurangi korupsi.

Kotak 4. Matriks Tindakan untuk Tenaga Kerja

Tindakan Jangka Pendek (dalam tahun pertama)	Tindakan Jangka Menengah (2-5 Tahun)
a. Mengumumkan hasil tinjauan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan.	a. Mengupayakan persetujuan legislatif atas reformasi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja.
b. Menetapkan mekanisme yang lebih konstruktif untuk menentukan upah minimum.	b. Menetapkan sistem perizinan nasional atas ketrampilan spesifik melalui ujian nasional yang terstandardisasi.
	c. Mendirikan fasilitas dan pelayanan publik, termasuk pusat informasi lapangan kerja publik, untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas tenaga kerja.

produktivitas dan menghasilkan lapangan pekerjaan. Kendala fiskal Pemerintah menuntut Indonesia untuk mampu menarik pendanaan swasta yang besar guna meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrukturnya seraya mempertahankan konsolidasi fiskal dan menghindari kewajiban kontingen yang tidak sepatutnya. Pemerintah juga perlu menggunakan anggarannya dengan lebih efisien dan efektif, serta melakukan analisis biaya-manfaat (cost benefit) yang sungguh-sungguh terhadap proyek-proyek. Beberapa pertimbangan penting mencakup:

Reformasi lebih lanjut di bidang-bidang ini dapat sangat meningkatkan fungsi pasar tenaga kerja Indonesia dan menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Menyusun kerangka hukum dan kebijakan yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan berkualitas membutuhkan pengambilan keputusan yang cermat dan matang, serta konsultasi dengan perwakilan dari tenaga kerja, bisnis dan pemerintah.

Pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dan trampil akan menghasilkan investasi dan pekerjaan yang lebih berkualitas. Pusat informasi lapangan kerja, peningkatan pelatihan dalam ketrampilan, serta akreditasi ketrampilan nasional atau sistem perizinan adalah beberapa langkah yang dapat memperluas kesempatan pekerjaan dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Kotak di bawah ini mencantumkan tindakan kebijakan prioritas yang disarankan.

#### (4) Infrastruktur

Infrastruktur di Indonesia telah merosot sejak awal krisis keuangan. Perbaikan infrastruktur adalah kunci untuk menarik investasi baru, mempertahankan daya saing Indonesia secara internasional, meningkatkan

1. Meningkatkan manajemen publik atas infrastruktur dengan menciptakan strategi jangka menengah untuk pembangunan infrastruktur.
2. Menciptakan atau member-dayakan kalangan berwenang independen dalam hal peraturan pada sektor-sektor infrastruktur yang utama.
3. Menetapkan kerangka yang transparan dan layak untuk partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan merevisi Keppres 7/1998 mengenai Kerja Sama Publik-Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur.

Kotak 5. Matriks Tindakan untuk Infrastruktur

Tindakan Jangka Pendek (dalam tahun pertama)	Tindakan Jangka Menengah (2-5 Tahun)
a. Menyiapkan strategi jangka menengah untuk pembangunan infrastruktur.	a. Melaksanakan strategi jangka menengah dan memantau kemajuannya.
b. Melaksanakan revisi atas Keppres 7/1998 mengenai Kerja Sama Publik-Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur.	b. Mengembangkan instrumen dan perencanaan keuangan yang dapat mendukung penggunaan simpanan dalam negeri untuk pembiayaan infrastruktur.
c. Menghilangkan hambatan-hambatan di investasi yang menggantung	c. Meningkatkan mekanisme peninjauan dan pengawasan atas proyek-proyek infrastruktur.
d. Menyusun dan mengumumkan suatu rencana untuk menangani permasalahan akuisisi tanah.	d. Membentuk badan-badan pengatur yang independen dalam sektor-sektor infrastruktur.

4. Mereformasi dasar peraturan untuk persaingan dan penetapan harga, untuk mencapai harga yang tepat dari pelayanan publik yang menyeimbangkan keberlanjutan/ profitabilitas proyek dengan penetapan harga yang kompetitif untuk mendukung daya saing industri pengguna.
5. Menetapkan sistem tinjauan dan pengawasan independen atas proyek-proyek infrastruktur guna mencegah korupsi.
6. Menjajaki cara-cara inovatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk memobilisasi simpanan dalam negeri dan meningkatkan pengeluaran pemerintah apabila memungkinkan dan layak.

Kotak di bawah ini mencantumkan tindakan kebijakan prioritas yang disarankan.

#### (5) Kebijakan Investasi dan Pembinaan UKM

White Paper menyatakan pentingnya kebijakan investasi bagi Indonesia, tetapi kemajuan di bidang ini (investasi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan) tertinggal dibanding yang lain (kestabilan makroekonomi dan reformasi sektor keuangan). Undang-undang investasi yang baru telah berulang kali tertunda dan Tim Nasional untuk mempromosikan investasi yang dibentuk oleh White Paper belum mencapai potensinya. Implementasi pelayanan “satu-atap” (“one-roof” service) juga tertunda, dan adanya ketidakpastian mengenai tingkat pemerintahan mana yang melaksanakannya. Kepemimpinan yang kuat pada tingkat tertinggi pemerintahan diperlukan untuk menyikapi permasalahan ini.

Keuntungan Indonesia di masa lalu karena upah yang rendah, biaya energi yang rendah dan daya saing mata uang telah pudar. Indonesia kini harus bersaing dalam pasar internasional di mana keuntungan kompetitif didapat dari deregulasi, pasar terbuka dan reformasi kebijakan investasi, lembaga dan mekanisme. Tantangan kebijakan yang utama pada bidang-bidang ini antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan keefektifan pelayanan publik yang berkaitan dengan investor, pada tingkat pusat dan daerah melalui simplifikasi dan deregulasi.
2. Menetapkan melalui undang-undang dan peraturan pelayanan “satu-atap” bagi para investor;
3. Memastikan arena bersaing yang seimbang (level playing field) bagi investor domestik dan internasional berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan investasi serta pelaksanaannya;
4. Meningkatkan pelayanan investor yang disediakan pemerintah, seperti informasi spesifik industri
5. Meningkatkan penegakan undang-undang hak properti intelektual guna mendorong investasi sektor jasa yang berkualitas tinggi.
6. Membantu pemerintahan daerah dan regional memperbaiki iklim investasi mereka dan membuka kesempatan investasi. Pemerintah pusat perlu mendorong kompetisi yang sehat di antara daerah;
7. Mendukung munculnya UKM yang menyediakan dukungan penting untuk investasi yang lebih besar. UKM jenis ini menyerap teknologi baru, mengembangkan ketrampilan manajerial, dan dapat menjadi sumber utama lapangan kerja sektor formal yang lebih berkualitas.

Kotak di bawah ini mencantumkan tindakan kebijakan prioritas yang disarankan.

#### Matriks Tindakan

Bagian berikut ini mengumpulkan matriks tindakan yang disajikan di atas ke dalam satu dokumen. Kami memandang matriks ini, demikian pula permasalahan umum di atas, sebagai titik awal untuk konsultasi yang dilakukan secara reguler dan intensif dengan Pemerintah dan untuk bekerja bersama sebaik mungkin dalam memperbaiki iklim investasi Indonesia.

Kotak 6. Matriks Tindakan untuk Kebijakan Investasi / pembinaan UKM	
Tindakan Jangka Pendek (dalam tahun pertama)	Tindakan Jangka Menengah (2-5 Tahun)
a. Memberlakukan Undang-Undang Investasi yang mencakup prinsip perlakuan secara adil terhadap investor dalam dan luar negeri.	a. Mendirikan fasilitas-fasilitas umum untuk pengembangan sumber daya manusia UKM.
b. Mengefisienkan kerangka peraturan untuk melaksanakan pelayanan investor satu-atap.	b. Memperkenalkan sistem pelatihan UKM tingkat daerah yang disetujui secara nasional.
c. Menyusun “Buku Aturan Investasi” sebagai sumber informasi dan panduan prosedur resmi bagi para pejabat maupun investor.	

## Matriks Tindakan di Bidang-bidang Kebijakan Prioritas Tinggi

	Tindakan Jangka Pendek (dalam tahun pertama)	Tindakan Jangka Menengah (2-5 Tahun)
(1) Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumumkan dan melaksanakan paket langkah-langkah reformasi pajak yang khususnya berkaitan dengan investor, seperti misalnya tingkat pajak potongan domestic untuk pelayanan, tingkat depresiasi, dan sebagainya.</li> <li>b. Membentuk badan peninjau independent dalam Kementerian Keuangan untuk melakukan kontrol kualitas yang efektif atas penilaian, meningkatkan transparansi dalam audit pajak, dan mencegah penilaian sewenang-wenang.</li> <li>c. Melakukan sosialisasi intensif mengenai Aturan Perilaku dan Undang-Undang Hak Wajib Pajak, termasuk dengan membagikannya kepada para pejabat dan mengadakan sesi-sesi pelatihan.</li> <li>d. Mengurangi jangka waktu untuk verifikasi dan pembayaran kembali PPN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumumkan dan melaksanakan rencana reformasi pajak yang komprehensif, termasuk tinjauan perundang-undangan pajak yang menggantung.</li> <li>b. Merevisi peraturan/panduan yang perlu untuk melaksanakan system penilaian sendiri sebagaimana dipraktekkan secara internasional.</li> <li>c. Menegakkan sepenuhnya Aturan Perilaku dan Undang-Undang Hak Wajib Pajak melalui langkah-langkah administrative dan hukum.</li> </ul>
(2) Bea & Cukai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meninjau "Aturan Perilaku", bagi Pejabat Bea Cukai, membagikannya kepada para pejabat bea cukai dan sector swasta serta mengadakan sesi-sesi pelatihan.</li> <li>b. Meningkatkan kualitas pelayanan bea cukai dan waktu yang diperlukan pengiriman untuk melewati bea cukai (misalnya, mengatasi penundaan yang terjadi saat ini dalam pelayanan di akhir pekan).</li> <li>c. Mengkompilasi "Buku Aturan Bea Cukai", suatu kumpulan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang harus diperbarui setiap tahun.</li> <li>d. Membentuk suatu badan independent untuk memantau pelaksanaan reformasi bea cukai yang dijanjikan dan melaporkannya kepada publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menegakkan sepenuhnya Aturan Perilaku melalui langkah-langkah administrative dan hukum.</li> <li>b. Merevisi undang-undang dan peraturan administrasi bea cukai untuk mencegah ketidakpastian dalam pelaksanaan.</li> <li>c. Memperkuat mekanisme kontrol pasca pelepasan dan ketrampilan analisis risiko yang terkait di antara para pejabat Bea Cukai.</li> <li>d. Mereformasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan mengakkan ketrampilan untuk menyelidiki penipuan guna mengurangi korupsi.</li> </ul>
(3) Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumumkan hasil tinjauan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan.</li> <li>b. Menetapkan mekanisme yang lebih konstruktif untuk menentukan upah minimum.</li> <li>c. Mendirikan fasilitas dan pelayanan public, termasuk pusat informasi lapangan kerja public, untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas tenaga kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengupayakan persetujuan legislative atas reformasi terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja.</li> <li>b. Menetapkan system perizinan nasional atas keterampilan spesifik melalui ujian nasional yang terstandardisasi.</li> </ul>
(4) Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan strategi jangka panjang menengah untuk pembangunan infrastruktur.</li> <li>b. Melaksanakan revisi atas Keppres 7/1998 mengenai Kerja Sama Publik-Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur.</li> <li>c. Menghilangkan hambatan-hambatan di investasi yang menggantung.</li> <li>d. Menyusun dan mengumumkan suatu rencana untuk menangani permasalahan akuisisi tanah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan strategi jangka menengah dan memantau kemajuannya.</li> <li>b. Mengembangkan peralatan dan rencana keuangan yang melaluinya tabungan dalam negeri dapat dikerahkan untuk pembiayaan infrastruktur.</li> <li>c. Meningkatkan mekanisme peninjauan dan pengawasan atas proyek-proyek infrastruktur.</li> <li>d. Membentuk badan-badan pengatur yang independen dalam sektor-sektor infrastruktur.</li> </ul>
(5) Kebijakan Investasi / pembinaan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberlakukan Undang-Undang investasi yang mencakup prinsip perlakuan secara adil terhadap investor dalam dan luar negeri.</li> <li>b. Mengefisienkan kerangka peraturan untuk melaksanakan pelayanan investor satu-ataap.</li> <li>c. Menyusun "Buku Aturan Investasi" sebagai sumber informasi dan panduan prosedur resmi bagi para pejabat maupun investor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendirikan fasilitas-fasilitas umum untuk pengembangan sumber daya manusia UKM.</li> <li>b. Memperkenalkan sistem pelatihan UKM tingkat daerah yang disetujui secara nasional.</li> </ul>

## Indonesia Policy Briefs | Gagasan untuk Masa Depan

- |                               |                                  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Kemiskinan                 | 8. Desentralisasi                | 15. Kehutanan                              |
| 2. Menciptakan Lapangan Kerja | 9. Sektor Keuangan               | 16. Pengembangan UKM                       |
| 3. Iklim Penanaman Modal      | 10. Kredit Untuk Penduduk Miskin | 17. Pertambangan                           |
| 4. Daya Saing                 | 11. Pendidikan                   | 18. Reformasi di Bidang Kepegawaian Negeri |
| 5. Infrastruktur              | 12. Kesehatan                    | 19. Pertanian                              |
| 6. Korupsi                    | 13. Pangan Untuk Indonesia       | 20. Kebijakan Pertanahan                   |
| 7. Reformasi Sektor Hukum     | 14. Mengelola Lingkungan Hidup   |  |